



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SUMATERA UTARA**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 1-B, Kec. Medan Johor, Medan 20143

TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020

WEBSITE : sumut.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-1949/RC.210/H.12.2/07/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Triwulan II

15 Juli 2026

Yth.
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Cq. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BRMP
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-581/RC.210/H.1/02/2026 tanggal 19 Februari 2026 mengenai Penyampaian Outline Laporan Bulanan dan Triwulan Kinerja dan Kegiatan Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2026, bersama ini disampaikan laporan bulanan capaian kinerja dan kegiatan BBRMP Sumut untuk Triwulan II Tahun 2026.

Atas perhatian dan kerja sama Ibu, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar ,



Mulyono, S.P., M.M
NIP 197305102001121001

Tembusan:
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

TRIWULAN II



**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Capaian Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara untuk periode triwulan II tahun 2026 ini dapat tersusun dengan baik. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sumatera Utara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2025 tentang Kementerian Pertanian yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pertanian, serta Permentan Nomor 10 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur OTK Unit Pelaksana Teknis BRMP, dan Permentan No 39 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Permentan No 10 Tahun 2025, kini Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara telah menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. BBRMP memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian sehingga BBRMP Sumatera Utara juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja.

Setiap capaian yang terangkum didalamnya tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan, tetapi juga bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kinerja ataupun kegiatan pelaksanaan program dan capaian kinerja yang memerlukan penguatan dan pengembangan lebih lanjut. Upaya pencapaian indikator kinerja pada sasaran program tetap dilaksanakan agar akuntabilitas kinerja instansi dapat tercapai dan terus ditingkatkan. Keberhasilan dan pencapaian kinerja BBRMP Sumatera Utara merupakan hasil kerja keras, dedikasi seluruh jajaran di BBRMP Sumatera Utara serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah baik Institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi dan peran Petani. Oleh karena itu, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Besar harapan kami, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja BBRMP Sumatera Utara selama dua triwulan serta menjadi landasan yang kokoh, memberi manfaat serta menjadi umpan balik bagi perencanaan strategis dan peningkatan kualitas program untuk triwulan berikutnya. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan kinerja dan pelaporan di waktu yang akan datang.

Medan, 1 Juli 2026

Kepala Balai Besar



Mulyono, S.P., M.M

NIP. 197305102001121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Berdasarkan Permentan No 39 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No 10 tahun 2025, terdapat perubahan organisasi dan tata kelola pada peningkatan eselon BRMP menjadi Balai Besar. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian. BBRMP juga turut mensukseskan program strategis Kementerian Pertanian yaitu program swasembada pangan khususnya padi dan komoditas lain yang menjadi prioritas nasional. Dalam mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian juga melaksanakan pengelolaan bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026. CPCL penerima bantuan akan ditetapkan oleh Dinas Provinsi setelah mendapatkan verifikasi dan validasi oleh BRMP Provinsi, sebagaimana tertuang dalam Permentan No 39 Tahun 2025 salah satu tugas dan fungsi BBRMP adalah pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program Pembangunan Pertanian. BBRMP sebagai instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya secara berkala yang dituangkan dalam bentuk laporan capaian kinerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan mencapai akuntabilitas kinerja instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026, BRMP Sumatera Utara memiliki lima sasaran yaitu 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, 2) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Kelima sasaran tersebut memiliki enam Indikator Kinerja Utama. IKS 1 yaitu jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan sebesar 1 lembaga, IKS 2 yaitu jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif sebanyak 1 teknologi dan jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan sebanyak 4.184 unit, IKS 3 yaitu jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern sebanyak 825 orang. IKS 4 yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) memiliki target sebesar 88,19 dan IKS 5 yaitu nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar target 93,29. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga bulan Juni sebesar 90,50.

Secara umum program nilai tambah dan daya saing belum terdapat realisasi anggaran karena masih terdapat blokir anggaran pada kegiatan yang bersumber dari PNBP, namun telah dilaksanakan tahap perencanaan dengan mempersiapkan proposal dan seminar proposal. Proses pembukaan blokir anggaran PNBP sudah dimulai pada akhir bulan Juni. Progress kegiatan pada program ketersediaan, konsumsi dan akses pangan telah memasuki tahap pelaksanaan dengan progress berkisar pada 15-80%. Kegiatan produksi benih sumber gandum masih mengalami kendala karena belum tersedianya benih sumber gandum dan saat ini anggaran tersebut sedang dalam proses pengalihan untuk kegiatan produksi benih sumber kedelai di satker lain. Kegiatan produksi benih sumber padi FS 20 ton pada bulan Juni yaitu pengendalian hama dan penyakit (walang sangit, burung) karena tanaman sudah memasuki fase generatif dan melakukan rouging ke 3. Pada kegiatan produksi benih sumber padi SS sedang dilaksanakan pemupukan ke II, penyiangan dan penyemprotan pestisida. Kegiatan produksi benih sumber jagung melakukan monitoring pemeliharaan tanaman jagung. Kegiatan produksi benih sumber bawang merah memasuki tahap sanitasi lahan, penyiangan, dan penyemprotan pestisida. Pada kegiatan produksi benih sumber bawang putih sudah

dilakukan penanaman seluas 2,6 Ha dan persiapan tanam 2,4 Ha. Kegiatan produksi benih sumber kedelai sudah dilakukan pemberian pupuk kedua dan stimulator sudah dilakukan agar diharapkan terjadinya peningkatan produksi karena lahan terdampak Curah Hujan Tinggi sehingga fuso seluas 13 Ha. Pada kegiatan penerapan teknologi pertanian adaptif melakukan monitoring pengendalian hama dan penyakit karena tanaman sudah memasuki fase generative (walang sangit, burung). Pada kegiatan refocusing telah dilaksanakan verifikasi dan validasi dokumen CPCL, kegiatan pendampingan program strategis Kementerian pertanian sudah memasuki tahapan persiapan (pembuatan SK), dan kegiatan piloting perakitan dan modernisasi Kawasan padi skala luas di Provinsi Sumatera Utara (100 Ha) sudah memasuki tahapan penyemprotan POC, pemupukan dan penyemprotan silika.

Pada aspek pengelolaan anggaran, pada DIPA awal BRMP Sumatera Utara berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2026, mengelola anggaran sebesar Rp. 15.040.673.000- (lima belas milyar empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional dan terbitnya dekret presiden maka dilakukan penyesuaian anggaran, penambahan anggaran operasional (002) maupun penyesuaian target output. Pagu total anggaran berdasarkan POK Revisi 6 tanggal 9 Juni 2026 meningkat menjadi sebesar Rp. 17.809.158.000 (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan blokir anggaran sebesar Rp 189.960.000. Realisasi anggaran berdasarkan data SP2D untuk periode 30 Juni 2026 sebesar Rp. 6.053.272.205 (34,36%), terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 2.661.723.377 (persentase realisasi dari pagu efektif 51,77 %), belanja barang Rp 3.391.548.828 (persentase realisasi dari pagu efektif 27,18%), sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 11.755.885.795. Realisasi penyetoran PNPB sebesar Rp 486.710.000 atau 135% dari target Rp 360.000.000.

Permasalahan yang dihadapi antara lain pemblokiran anggaran khususnya pemblokiran untuk kegiatan bersumber dari PNPB. Kendala utama pada kegiatan produksi perbenihan benih sumber yaitu *force majeure* (cuaca ekstrim) dimana pada produksi benih sumber padi FS terdampak curah hujan tinggi sehingga sebagian tanaman rebah, kegiatan produksi benih sumber kedelai terdampak curah hujan yang tinggi juga sehingga lahan menjadi tergenang (fuso) seluas 13 Ha, dan untuk kegiatan produksi benih sumber jagung terdampak juga sehingga memerlukan pemantauan lebih ketat. Kendala lainnya yaitu pada produksi benih bawang putih, pertumbuhan lambat karena waktu tanam tunas benih belum 100%, sedangkan untuk gandum belum tersedia benih sumber gandum. Upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain koordinasi internal dalam rapat manajemen yang telah dilaksanakan pada setiap minggu. Koordinasi juga dilakukan dengan unit kerja dan eselon 1 terkait penyediaan benih sumber khususnya gandum dan upaya mengalihkan anggaran produksi benih sumber gandum untuk kegiatan produksi benih sumber kedelai di satker lain.

Sebagai tindak lanjut, BRMP Sumatera Utara terus melaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan lapangan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui pengisian matriks progress kegiatan, pertemuan rutin dengan pimpinan pada setiap minggu. Koordinasi dengan satker lingkup Kementerian Pertanian di Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal teknis, pemerintah daerah, penyuluh pertanian juga terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target output.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Berdasarkan Permentan No 39 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No 10 tahun 2025, terdapat perubahan organisasi dan tata kelola pada peningkatan eselon BRMP menjadi Balai Besar. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
3. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasa, pengujian diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
5. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern.
6. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian.
8. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
9. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, pada tahun 2026 BRMP Sumatera Utara memiliki tiga program yaitu Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, Program nilai tambah dan daya saing industri, dan dukungan manajemen. Pelaksanaan program/kegiatan hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, BBPMP Sumatera Utara telah melakukan pengukuran kinerja dan melaporkannya secara rutin kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai unit eselon I Kementerian Pertanian.

Program dan kegiatan yang dipantau mencakup pelaksanaan kegiatan yang mendukung sasaran strategis Balai antara lain jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (lembaga), jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif sebanyak (teknologi), jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (unit), jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (orang). Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara (Nilai).

Laporan triwulan II BBPMP Sumatera Utara disusun sebagai instrumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama dua triwulan, mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Balai. Laporan ini memberikan gambaran umum mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan utama, tingkat capaian indikator kinerja, serta realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh BBPMP Sumut dan dilaporkan secara periodik. Pada akhirnya, instrumen ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya serta sebagai sarana evaluasi untuk kegiatan pada bulan berikutnya.

II. CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis dalam perjanjian kinerja. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Target kinerja BBPMP Sumatera Utara tahun 2026 merupakan target kinerja dalam kurun waktu satu tahun selama tahun 2026 sehingga setiap bulannya merupakan perkembangan realisasi dan persentase capaian terhadap target yang diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun. Kriteria keberhasilan dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Pencapaian kinerja BBPMP Sumatera Utara Tahun 2026 dalam enam IKS (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) untuk mencapai lima sasaran strategis kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal dan PK Revisi I yang ditandatangani pada bulan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2026 dalam Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga	0
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	1	Teknologi	0
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	4.184	Unit	0
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern	825	Orang	0
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19	Nilai	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	93,29	Nilai	90,50

2.2 Capaian Kinerja Strategis Lainnya

Capaian kinerja kegiatan strategis lainnya antara lain:

1. Penambahan Luas Tambah Tanam hingga tanggal 30 Juni 2026 dipaparkan sebagai berikut:

Kinerja LTT Bulan Juni 2026																	
Data Per Tanggal 30 Juni 2026																	
No	Kabupaten / Kota	Total Target LTT	Realisasi Tgl 30 Juni 2026							Realisasi Tgl 1-30 Juni 2026							Total LTT terhadap Target LTT Bulan Juni (%)
		Jun-26	LTT Reguler (Ha)	Oplah 2024 (ha)	Oplah 2025 (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Rehab Bencana	Total LTT (Ha)	LTT Reguler (Ha)	Oplah 2024 (Ha)	Oplah 2025 (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Rehab Bencana	Total LTT (Ha)	
	SUMATERA UTARA	84.532,07	2.936,83	1.581,5	1.732,80	3,00	994,95	0,00	7.249,08	43.644,32	9.252,25	11.182,90	141,00	2.290,75	28,00	66.539,22	78,71%
1	KAB. LABUHANBATU SELATAN	29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	68,00	0,00	8,00	104	0,00	0	180,00	620,69%
2	KAB. TAPANULI UTARA	108	0,00	0,00	0,00	0	0,10	0	0,10	287,00	0,00	8,00	9	3,10	9	316,10	292,69%
3	KAB. SIMALUNGUN	5.003	208,60	0,00	0,00	0	1,00	0	209,60	6.213,89	0,00	0,00	0	108,50	0	6.322,39	126,37%
4	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	630	13,00	0,00	0,00	0	0,00	0	13,00	758,00	0,00	0,00	0	0,00	0	758,00	120,32%
5	KOTA GUNUNGSITOLI	221	33,30	0,00	0,00	0	0,00	0	33,30	257,36	0,00	0,00	0	0,00	0	257,36	116,45%
6	KOTA TANJUNG BALAI	46	3,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	38,00	0,00	0,00	0	10,00	0	48,00	104,35%
7	KAB. PAKPAK BHARAT	105	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	103,50	0,00	0,00	0	2,00	0	105,50	100,48%
8	KOTA TEBING TINGGI	9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0	0,00	0	9,00	100,00%
9	KOTA PADANGSIDIMPUAN	990	33,70	0,00	1,30	0	0,00	0	35,00	905,95	1,25	46,90	0	0,00	0	954,10	96,37%
10	KAB. TAPANULI SELATAN	2.892	103,55	20,00	10,00	0	0,75	0	134,30	2.411,61	192,00	129,00	0	42,75	0	2.775,36	95,97%
11	KAB. PADANG LAWAS UTARA	3.490	179,50	0,00	25,00	0	6,00	0	210,50	2.826,50	0,00	494,50	0	21,50	0	3.342,50	95,77%
12	KAB. ASAHAN	3.813	380,00	131,00	278,00	0	0,00	0	789,00	2.078,50	465,50	1.088,00	0	0,00	0	3.632,00	95,25%
13	KAB. PADANG LAWAS	1.685	0,75	8,00	0,00	0	0,00	0	8,75	1.534,43	11,00	32,00	17	0,00	8	1.602,43	95,10%
14	KAB. DAIRI	1.295	19,50	0,00	15,00	0	42,50	0	77,00	939,50	0,00	28,00	0	261,50	0	1.229,00	94,90%
15	KAB. DELI SERDANG	11.667	534,31	935,00	184,00	0	0,00	0	1.653,31	5.389,03	3.491,00	1.678,70	0	0,00	0	10.558,73	90,50%
16	KAB. NIAS BARAT	454	37,00	12,00	0,00	0	0,00	0	49,00	332,00	71,00	0,00	0	0,00	0	403,00	88,77%
17	KAB. NIAS SELATAN	1.124	65,00	11,00	5,00	0	0,00	0	81,00	590,53	74,00	35,00	0	157,00	0	856,53	76,20%
18	KAB. LABUHANBATU UTARA	969	2,00	0,00	2,00	0	1,00	0	5,00	431,00	78,00	185,00	0	15,50	0	709,50	73,22%
19	KAB. LABUHANBATU UTARA	2.562	1,00	14,00	0,00	0	0,00	0	15,00	274,00	1.381,50	201,00	0	0,00	0	1.856,50	72,46%
20	KOTA PEMATANGSIANTAR	390	4,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4,00	282,50	0,00	0,00	0	0,00	0	282,50	72,44%
21	KAB. TOBA	1.165	31,00	0,00	0,00	0	1,00	0	32,00	799,00	0,00	0,00	0	19,00	0	818,00	70,21%
22	KAB. SERDANG BEDAGAI	14.947	205,00	46,00	424,50	0	0,00	0	675,50	6.055,00	542,00	3.611,00	0	0,00	0	10.208,00	68,29%
23	KAB. BATU BARA	4.477	91,05	0,00	88,00	0	0,00	0	179,05	2.186,91	0,00	847,00	0	0,00	0	3.033,91	67,77%
24	KAB. SAMOSIR	976	32,50	0,00	1,00	0	0,00	0	33,50	504,90	5,00	143,00	0	5,00	0	657,90	67,41%
25	KAB. MANDAILING NATAL	9.343	734,02	317,50	572,00	0	939,60	0	2.563,12	2.809,33	911,00	799,30	0	1.591,90	0	6.111,53	65,41%
26	KOTA MEDAN	605	6,50	0,00	0,00	0	0,00	0	6,50	363,60	0,00	11,00	8	8,00	0	390,60	64,56%
27	KAB. LANGKAT	6.765	92,00	58,00	61,00	0	0,00	0	211,00	1.431,00	1.583,00	1.315,00	0	12,00	0	4.341,00	64,17%
28	KOTA BINJAI	410	6,30	0,00	0,00	0	0,00	0	6,30	257,70	0,00	0,00	0	0,00	0	257,70	62,85%
29	KAB. NIAS	1.356	35,00	23,00	56,00	0	0,00	0	114,00	356,50	155,50	311,00	0	0,00	0	823,00	60,69%
30	KAB. TAPANULI TENGAH	4.672	76,75	6,00	10,00	0	3,00	0	95,75	2.343,00	238,50	177,50	0	17,00	0	2.776,00	59,42%
31	KAB. NIAS UTARA	1.180	7,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7,00	696,08	0,00	0,00	0	0,00	0	696,08	58,99%
32	KAB. KARO	1.156	1,50	0,00	0,00	3	0,00	0	4,50	111,00	52,00	34,00	3	16,00	11	227,00	19,64%
33	KOTA SIBOLGA	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

2. BBRMP Sumatera Utara menerima usulan bantuan benih padi reguler, Oplah, dan padi lahan kering dari 17 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Nias, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batubara. Berdasarkan data per 29 Juni 2026, total usulan bantuan benih padi mencapai luas 95.418 Ha, dengan realisasi penyaluran benih padi telah mencapai luas 53.772 Ha. Sementara itu, untuk kegiatan Bantuan Pemerintah Mandiri Benih, usulan berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan dengan luas masing-masing 10 Ha, sehingga total

luas usulan mencapai 50 Ha. Bantuan tersebut telah direalisasikan melalui mekanisme transfer dengan nilai sebesar Rp204.900.000,00 pada Tahap 1 dan Rp 136.600.000 pada Tahap II.

3. Usulan CPCL Bantuan Pemerintah untuk benih jagung disampaikan oleh 11 Kabupaten dengan total usulan benih sebanyak 494.850 kg untuk lahan seluas 36.535 Ha.
4. Usulan alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen tanaman pangan berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Jenis alsin yang diusulkan antara lain *riding rice transplanter*, traktor rotary roda 4, dan *combine harvester* masing-masing sebanyak 1 unit. Untuk luas lahan sasaran yang akan diberi bantuan alsintan adalah 46 Ha. Usulan Alsintan PM-AAS yang diusulkan dari Kabupaten Batubara antara lain drone, hand sprayer, crawler rotavator dan combine harvester.
5. Usulan CPCL Bantuan Pemerintah perlindungan tanaman pangan untuk penerapan PHT Padi berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Batubara, Asahan, Serdang Bedagai, dan Simalungun dengan total luasan 206Ha/Unit. PHT aneka kacang dan umbi diusulkan oleh Kabupaten Batubara dengan luasan usulan sebesar 30 Ha dan Pembuatan Rumah Burung Hantu dari Kabupaten Asahan, Simalungun dan Deli Serdang dengan total usulan sebanyak 50 unit. Usulan CPCL Bantuan Pemerintah bidang perlindungan tanaman pangan untuk sarana laboratorium terdiri atas 5 (lima) usulan yang berasal dari Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Agens Hayati (LPHP/AH) Medan Johor, LPHP/AH Pematang Kerasaan, LPHP/AH Padang Balangka, LPHP/AH Tanjung Morawa, serta Laboratorium Pengujian Mutu Residu Provinsi Sumatera Utara. Usulan CPCL lainnya yaitu untuk pengembangan kawasan durian dan bawang putih seluas 45 Ha serta perluasan kopi di Kabupaten Karo seluas 1.0005Ha.
6. Kegiatan piloting PM-AAS (Pertanian Modern-Advanced Agricultural System) telah terealisasi sesuai target 100 Ha. Lokasi tanam tersebar di empat desa dengan masing-masing luasan yaitu Desa Sei Buluh 4 Ha, Desa Tualang 10 Ha, Desa Sukaraja 77 Ha, Desa Aras 9 Ha. Progress kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyemprotan POC, pemupukan, penyemprotan silika.
7. Rapat koordinasi pendayagunaan penyuluh telah dilaksanakan pada 18 Juni 2026 dihadiri Direktur Wilayah (Kepala BRMP Sumatera Utara), Perwakilan Polbangtan Medan, Perwakilan Balai Veteriner Medan, Perwakilan BPLIP, Tim BRMP Sumut, Penyuluh CWS Provinsi, dan para Ketua Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
8. Pembentukan kelompok capir digital di tingkat Kabupaten (KG3) telah tercapai 100%, sedangkan untuk di tingkat kecamatan (KG4) pada bulan April dan Mei berturut-turut yaitu 95,02% dan 95,48 % dan telah mencapai 96,83% pada akhir bulan Juni 2026. Pada sisi lain, kelompok capir digital di tingkat desa (KG5) berkisar 82,48-89,41 % pada periode April-Juni tahun 2026.

III. REALISASI ANGGARAN

Pada aspek pengelolaan anggaran, pada DIPA awal BRMP Sumatera Utara berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2026, mengelola anggaran sebesar Rp. 15.040.673.000- (lima belas milyar empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional dan terbitnya dekrit presiden maka dilakukan penyesuaian anggaran dan penambahan anggaran operasional (002) maka maupun penyesuaian target output. Pagu total anggaran berdasarkan POK Revisi 6 tanggal 9 Juni 2026 meningkat menjadi sebesar Rp. 17.809.158.000 (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan blokir anggaran sebesar Rp 189.960.000. Realisasi anggaran berdasarkan data SP2D untuk periode 30 Juni 2026 sebesar Rp. 6.053.272.205 (34,36%), terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 2.661.723.377 (persentase realisasi dari pagu efektif 51,77 %), belanja barang Rp 3.391.548.828 (persentase realisasi dari pagu efektif 27,18%), sedangkan sisa anggaran sebesar Rp 11.755.885.795. Realisasi penyetoran PNPB sebesar Rp 486.710.000 atau 135% dari target Rp 360.000.000. Realisasi anggaran per jenis belanja disampaikan pada Tabel 3.1. Tabel 3.2 menunjukkan Gap realisasi anggaran dan target serapan periode sampai dengan Juni 2026.

Tabel 3.1. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Total	Realisasi SP2D	% Realisasi dari Pagu Total	Sisa Pagu	Blokir	Pagu Netto	Outstanding Kontrak (OC)	Pagu Tidak Terikat	% Realisasi dari Pagu Efektif	% Realisasi dari Pagu Efektif dengan OC
a	b	c	d=(c/d)	e=(b-c)	f	g=(b-c-f)	h	i=(b-c-f-h)	j=c/(b-f)	k=(c+h)/(b-f)
51	5.141.472.000	2.661.723.377	51,77%	2.479.748.623	-	2.479.748.623	-	2.479.748.623	51,77%	51,77%
52	12.667.686.000	3.391.548.828	26,77%	9.276.137.172	189.960.000	9.086.177.172	-	9.086.177.172	27,18%	27,18%
53	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Total	17.809.158.000	6.053.272.205	33,99%	11.755.885.795	189.960.000	11.565.925.795	-	11.565.925.795	34,36%	34,36%

Tabel 3.2. Gap Realisasi Anggaran dan Target Serapan Periode Januari s.d Juni 2026

Jenis Belanja	Pagu Total	Blokir	Pagu Efektif	% Target Serapan	Nominal Target	Realisasi	Gap	% Gap
51	5.141.472.000	-	5.141.472.000	25,00%	2.570.664.000	2.661.723.377	- 91.059.377	-3,42%
52	12.667.686.000	189.960.000	12.477.726.000	16,35%	4.142.532.000	3.391.548.828	750.983.172	22,14%
53	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17.809.158.000	189.960.000	17.619.198.000	-	6.713.196.000	6.053.272.205	659.923.795	0

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran per Program Periode Juni 2026

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Realisasi Belanja Pegawai	Realisasi Belanja Barang	Realisasi Belanja Modal	% Realisasi Belanja Pegawai	% Realisasi Belanja Barang	% Realisasi Belanja Modal
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	6918	5.141.472.000	3.236.581.000	-	2.661.723.377	1.735.773.377	-	51,77%	53,63%	-
2	7911	-	264.990.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
3	7912	-	9.166.115.000	-	-	1.655.775.451	-	0,00%	18,06%	-
Total		5.141.472.000	12.667.686.000	-	2.661.723.377	3.391.548.828	-			

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Periode s.d Juni 2026

No	Kode (Sumber Dana)	Pagu Belanja Pegawai	Pagu Belanja Barang	Pagu Belanja Modal	Realisasi Belanja Pegawai	Realisasi Belanja Barang	Realisasi Belanja Modal	% Realisasi Belanja Pegawai	% Realisasi Belanja Barang	% Realisasi Belanja Modal
1	RUPIAH MURNI	5.141.472.000	12.402.656.000	-	2.661.723.377	3.391.548.828	-	51,77%	27,35%	#DIV/0!
2	PNBP	-	264.990.000	-	-	-	-	-	-	-
Total		5.141.472.000	12.667.686.000	-	2.661.723.377	3.391.548.828	-	1	0	#DIV/0!

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Juni 2026

No	Uraian	Target DIPA (Rp)	Realisasi Setoran (Rp)	Sisa yang belum disetor (Rp)
1.	Laboratorium	160.000.000	43.665.000	156.335.000
2.	IP2TP Pasar Miring	100.000.000	428.145.000	179.145.000
3.	IP2TP Gurgur	50.000.000	-	100.000.000
4.	Penjualan DOC	50.000.000	14.900.000	135.100.000
	Jumlah	360.000.000	486.710.000	213.290.000

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara mendapatkan target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 360.000.000. Pendapatan yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp 486.710.000 dengan persentase 135% dari target PNPB dalam DIPA TA 2026 (Tabel 3.5).

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada bulan Juni 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, baik berdasarkan pagu keseluruhan maupun pagu efektif. Meskipun demikian, penyerapan anggaran masih dipengaruhi oleh adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan, sehingga diperlukan percepatan penyelesaian proses pembukaan blokir anggaran, optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dapat dilaksanakan, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adanya penambahan anggaran refocusing turut memengaruhi capaian target serapan anggaran hingga bulan Juni, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

A. E-Monev Bappenas

E-Monev Bappenas adalah sistem aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan nasional agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.



⌵

Beranda

📊

Dashboard

➤

☰

Pelaporan

⌵

•

Komponen Satker

📄

Generate

➤

TA 2026

🌙

🖨

PELAPORAN KOMPONEN

» Pelaporan Komponen

Data Satuan Kerja

silahkan klik pada nomenkelatur satuan kerja untuk melihat detail komponen.

Tampilkan 10 data

Cari:

NOMENKLATUR	Anggaran			Pelaksanaan	Kelengkapan									
	Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	
567428 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	17,81 M	6,61 M	37,0%	38.25%										

Dari hasil aplikasi E-monev terlihat bahwa persentase penyerapan/realisasi anggaran di bulan Juni sebesar 37% dari alokasi anggaran 17,81 Milyar, sedangkan untuk pelaksanaan progress sudah mencapai 38,25%.

B. Monitoring Kegiatan Teknis

Kegiatan dengan sumber anggaran PNPB yaitu standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, layanan laboratorium hasil pengujian dan pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian masih mengalami kendala dalam realisasi fisik maupun anggaran karena masih terdapat blokir anggaran. Kegiatan yang didanai PNPB seringkali memiliki dinamika dan tuntutan akuntabilitas yang berbeda, sehingga diperlukan pemantauan pada pencapaian output kegiatan agar sesuai waktu yang direncanakan. Hasil pemantauan pada kegiatan produksi benih sumber dan penerapan teknologi pertanian adaptif dan modern, realisasi fisik kegiatan berkisar dari 15-75 % dan realisasi anggaran berkisar pada 0%-86,41%. Realisasi anggaran terendah terdapat pada produksi bibit ayam KUB, sedangkan

realisasi anggaran tertinggi yaitu pada produksi benih bawang merah sebesar 86,41%. Progress kegiatan yang telah dilaksanakan hingga bulan Juni dipaparkan sebagai berikut.

1. Produksi Benih Sumber Kedelai

Tanaman kedelai pada dua lokasi pertanaman mengalami genangan akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini diperparah dengan tidak berfungsinya saluran pembuangan air secara optimal karena tinggi muka air di sekitar lokasi lebih tinggi dibandingkan saluran drainase yang tersedia, sehingga air tidak dapat mengalir keluar dari areal pertanaman. Lokasi pertanaman kedelai di Kecamatan Stabat yang terendam seluas 6 Ha dari total 8 Ha dan di Kecamatan Hinai seluas 7 Ha terendam seluruhnya, sehingga luas pertanaman yang mengalami puso seluas 13 Ha.

2. Produksi Benih Sumber Jagung

Kegiatan produksi benih sumber jagung telah dilakukan penanaman di IP2MP Gurgur untuk varietas Lamuru dan di IP2MP Pasar Miring menggunakan varietas Bisma. Tingginya curah hujan sehingga memerlukan monitoring lapang lebih intensif.

3. Produksi Benih Sumber Padi

Kegiatan produksi benih sumber padi FS 20 ton yaitu melakukan monitoring pengendalian hama dan penyakit (walang sangit, burung) karena tanaman sudah memasuki fase generatif dan melakukan rouging ke 3. Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi SS, telah dilaksanakan pemupukan kedua, penyiangan dan penyemprotan pestisida. Pertumbuhan optimal pada varietas Inpari 32 dan Cakrabuana, namun kurang optimal untuk mekongga dikarenakan kemungkinan lahannya yang salin.

4. Produksi Benih Sumber Bawang Putih

Pada kegiatan produksi benih sumber bawang putih sudah selesai penanaman seluas 2,6 Ha dan saat ini sedang dilakukan proses pemeliharaan tanaman. Persiapan tanam berikutnya sedang dilaksanakan untuk lahan seluas 2,4 Ha.

5. Produksi Benih Sumber Gandum

Kegiatan produksi benih sumber gandum direncanakan pelaksanaannya di IP2MP Gurgur, dan Kebun Percobaan Tongkoh, Brastagi. Namun demikian hingga periode triwulan II kegiatan, benih sumber gandum tidak tersedia sehingga pada saat laporan disusun, anggaran kegiatan sedang dalam proses pengalihan untuk produksi benih sumber kedelai pada satker lain.

6. Produksi Benih Bawang Merah

Produksi benih bawang merah dilaksanakan di lahan seluas 0,5 Hektar di IP2MP Gurgur. Varietas yang digunakan yaitu Batu Ijo. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juni yaitu sanitasi lahan, penyiangan, dan penyemprotan pestisida.

7. Paket Teknologi Pertanian Terapan Adaptif dan Modern

Hasil penting yang telah dicapai hingga bulan Juni 2026 antara lain bahwa pertanaman berkembang dengan baik dan pada akhir Juni 2026 telah memasuki fase pengisian malai. Pengamatan parameter pertumbuhan berupa tinggi tanaman dan jumlah anakan telah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 dan 1 Juni 2026 untuk varietas Inpari 42 dan

Cakrabuana. Umur tanaman pada akhir Juni masing-masing mencapai 73 HST untuk varietas Inpari 42 dan 71 HST untuk varietas Cakrabuana. Kegiatan pengamatan organisme pengganggu tanaman (OPT) juga telah dilaksanakan secara berkala bersama Pengamat Hama Penyakit (PHP) sebagai dasar pelaksanaan tindakan pengendalian. Pengendalian terhadap hama walang sangit dan burung telah dilakukan sehingga kondisi pertanaman tetap terjaga selama fase pembentukan dan pengisian malai.

Selain itu, pada akhir Juni 2026 terjadi kondisi cuaca yang kurang mendukung berupa hujan disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa titik pertanaman varietas Cakrabuana mengalami rebah (*lodging*). Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang meluas karena segera dilakukan tindakan penanganan di lapangan melalui pengikatan batang tanaman menggunakan tali sehingga tanaman dapat kembali berdiri tegak dan tetap melanjutkan proses pengisian malai secara optimal. Secara umum, seluruh tahapan budidaya yang telah dilaksanakan menunjukkan perkembangan pertanaman yang baik dan mendukung keberhasilan penerapan teknologi pertanian adaptif dan modern.

V. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Perkembangan kegiatan di BBRMP Sumatera Utara hingga bulan Juni tahun 2026 secara umum telah terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan. Namun demikian masih terdapat sejumlah kendala pada beberapa kegiatan. Blokir anggaran pada kegiatan yang bersumber dari PNPB menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan. Dengan demikian capaian kinerja PK yang bersumber dari program nilai tambah dan daya saing seperti standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, instrumen pertanian yang diuji maupun lembaga penerap pertanian belum tercapai. Kegiatan dapat dilaksanakan setelah realisasi setoran PNPB dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang tidak terblokir.

Kegiatan benih gandum terkendala karena hingga periode triwulan II kegiatan, benih sumber gandum tidak tersedia sehingga pada saat laporan disusun, anggaran kegiatan sedang dalam proses pengalihan untuk produksi benih sumber kedelai pada satker lain. Pada kegiatan kegiatan produksi benih sumber lainnya kendala kondisi cuaca yang tidak menentu dengan curah hujan yang relatif tinggi pada beberapa waktu berpotensi mempengaruhi kondisi pertanaman, efektivitas pemupukan dan aplikasi pestisida di lapangan. Pada kegiatan produksi benih sumber kedelai, lahan tergenang sehingga menjadi puso seluas 13 Ha, sedangkan pada produksi benih sumber padi FS 20 Ton dan kegiatan Teknologi Pertanian Terapan Adaptif dan Modern tanaman rebah karena curah hujan yang tinggi. Selain itu, pertumbuhan gulma yang cukup cepat akibat kondisi lingkungan yang mendukung memerlukan pengendalian yang lebih intensif agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

Upaya yang dilakukan yaitu pada kegiatan produksi benih sumber kedelai dengan pemberian pupuk kedua dan stimulator agar diharapkan terjadinya peningkatan produksi. Terkait tanaman yg puso, dilakukan penanaman ulang di lahan seluas 10 Ha, kerjasama dengan Puskopai TNI AL I untuk produksi benih kedelai label SS. Sedangkan pada kegiatan Teknologi Pertanian Terapan Adaptif dan Modern terjadi kondisi cuaca yang kurang mendukung berupa hujan disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa titik pertanaman varietas Cakrabuana mengalami rebah (*lodging*). Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menyebabkan kerusakan yang meluas karena segera dilakukan tindakan penanganan di lapangan melalui pengikatan batang tanaman menggunakan tali sehingga tanaman dapat kembali berdiri tegak dan tetap melanjutkan proses pengisian malai secara optimal. Secara umum, seluruh tahapan budidaya yang telah dilaksanakan menunjukkan perkembangan pertanaman yang baik dan mendukung keberhasilan penerapan teknologi pertanian adaptif dan modern.

Upaya tindak lanjut permasalahan yaitu melalui koordinasi internal melalui rapat manajemen mingguan dan mendapatkan arahan pimpinan, koordinasi eksternal baik dengan unit kerja lainnya, sekretariat BRMP, POPT, BWS, Dinas Kabupaten, serta penyuluh Kabupaten/Kota. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah berdasarkan indikator kinerja disajikan pada Lampiran 2.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kinerja BBRMP Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2026 secara umum menunjukkan perkembangan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Secara umum kegiatan telah masuk pada tahap pelaksanaan dengan realisasi fisik kegiatan berkisar antara 15-80% dengan realisasi anggaran di BBRMP Sumatera Utara sebesar 33,99%. Realisasi anggaran hingga triwulan II belum sesuai dengan target serapan yang direncanakan untuk bulan Juni yaitu 50%, karena terdapat penambahan anggaran refocusing pada minggu pertama bulan Juni yang memengaruhi nilai serapan anggaran. Namun demikian masih ditemukan kendala/permasalahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output kinerja. Upaya tindak lanjut permasalahan yaitu melalui koordinasi internal melalui rapat manajemen mingguan dan mendapatkan arahan pimpinan, koordinasi eksternal baik dengan unit kerja lainnya, sekretariat BRMP, POPT, BWS, Dinas Kabupaten, serta penyuluh Kabupaten/Kota. Permasalahan utama yang dihadapi terkait pencapaian indikator adalah dukungan anggaran perjalanan dinas yang terbatas dan blokir pada anggaran yang bersumber dari kegiatan program nilai tambah dan daya saing.

Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yakni 1) Melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran kegiatan saat ini dan melakukan penyesuaian alokasi dengan mempertimbangan terhadap pencapaian target PK, 2) Melakukan analisis terhadap hasil pengisian survey layanan dengan memperhatikan saran dan masukan dari responden sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan yang ada di BBRMP Sumatera Utara, 3) Melakukan internalisasi Pembangunan Zona Integritas secara berkala, 4) Melakukan penderasan informasi Pembangunan Zona Integritas melalui medsos secara berkala, 5) Masing-masing bidang menyusun rencana dan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang dilakukan di bidangnya masing-masing, melaksanakan percepatan realisasi kegiatan khususnya refocusing dan meningkatkan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dengan mengacu pada RPD.

Lampiran 1. LTT April dan Mei Tahun 2026

No	Kabupaten / Kota	Total Target LTT (Ha)	Realisasi Tgl 30 April 2026						Realisasi Tgl 1-30 April 2026					Total LTT terhadap Target LTT Bulan April (%)
		Apr-26	LTT Reguler (Ha)	Oplah 2024 (ha)	Oplah 2025 (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Total LTT (Ha)	LTT Reguler (Ha)	Oplah (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Total LTT (Ha)	
SUMATERA UTARA		59.270	2.543,66	5.001,5	4.561,84	0,00	83,50	12.190,50	32.012,78	16.761,84	42,00	1.072,35	49.888,97	84,17%
1	KAB. LABUHANBATU SELATAN	10	0,00	0	0	0	6,00	6,00	15,20	96,00	6,00	14,00	131,20	1312,00%
2	KOTA TEBING TINGGI	3	2,10	0	0	0	0,00	2,10	31,34	0,00	-	0,00	31,34	1044,67%
3	KAB. LANGKAT	277	0,00	1500	3	0	0,00	1.503,00	357,50	1.885,00	-	3,00	2.245,50	810,65%
4	KOTA MEDAN	22	3,00	0	9	0	0,00	12,00	27,10	26,00	8,00	6,00	67,10	305,00%
5	KAB. PADANG LAWAS UTARA	1225	16,50	0	1600	0	0,00	1.616,50	1.417,00	1.802,50	-	6,50	3.226,00	263,35%
6	KAB. ASAHAN	24	0,00	0	0	0	0,00	0,00	54,00	0,00	-	0,00	54,00	225,00%
7	KAB. KARO	540	11,00	0	0	0	0,00	11,00	834,00	142,00	19,00	11,00	1.006,00	186,30%
8	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	98	0,00	0	0	0	0,00	0,00	170,00	0,00	-	0,00	170,00	173,47%
9	KAB. DELI SERDANG	2522	208,49	1004	5	0	0,00	1.217,49	2.867,21	1.258,00	-	0,00	4.125,21	163,57%
10	KAB. SAMOSIR	91	10,50	0	0	0	0,00	10,50	145,80	1,50	-	0,00	147,30	161,87%
11	KAB. BATU BARA	1972	14,00	0	323	0	0,00	337,00	761,01	2.077,50	-	0,00	2.838,51	143,94%
12	KAB. DAIRI	776	4,00	0	0	0	2,00	6,00	867,00	72,00	-	41,25	980,25	126,32%
13	KAB. TAPANULI UTARA	199	9,50	0	0	0	0,00	9,50	217,20	8,00	8,00	5,50	238,70	119,95%
14	KOTA PEMATANGSIANTAR	277	7,50	0	0	0	0,00	7,50	324,00	0,00	-	0,00	324,00	116,97%
15	KAB. TOBA	1238	22,00	0	0	0	0,00	22,00	1.408,00	0,00	-	0,00	1.408,00	113,73%
16	KAB. TAPANULI SELATAN	2601	65,30	20	10	0	1,75	97,05	2.542,06	168,80	-	59,75	2.770,61	106,52%
17	KAB. PAKPAK BHARAT	937	47,00	0	0	0	41,25	88,25	570,29	0,00	-	408,50	978,79	104,46%
18	KAB. NIAS SELATAN	2278	51,00	0	24	0	5,00	80,00	1.884,00	436,00	-	55,00	2.375,00	104,26%
19	KAB. NIAS	1052	23,50	0	15,3	0	0,00	38,80	506,50	550,00	-	1,00	1.057,50	100,52%
20	KAB. PADANG LAWAS	803	2,50	0	257,04	0	0,00	259,54	457,04	282,04	-	8,00	747,08	93,04%
21	KAB. LABUHANBATU	3469	246,00	75	303	0	0,00	624,00	1.361,50	1.690,50	-	5,50	3.057,50	88,14%
22	KOTA BINJAI	68	1,30	0	0	0	0,00	1,30	56,40	0,00	-	0,00	56,40	82,94%
23	KAB. SIMALUNGUN	6908	455,84	0	0	0	2,50	458,34	5.213,85	20,00	-	70,60	5.304,45	76,79%
24	KOTA PADANGSIDIMPUAN	1466	43,60	0	0	0	0,00	43,60	943,05	0,00	-	0,00	943,05	64,33%
25	KAB. NIAS BARAT	543	16,00	4	3	0	0,00	23,00	300,00	30,00	-	0,00	330,00	60,77%
26	KAB. MANDAILING NATAL	6178	472,07	50	45,5	0	25,00	592,57	2.951,47	253,50	1,00	375,75	3.581,72	57,98%
27	KAB. LABUHANBATU UTARA	4540	19,00	1593	196	0	0,00	1.808,00	183,00	2.418,50	-	1,00	2.602,50	57,32%
28	KAB. TAPANULI TENGAH	3156	47,25	5,5	13	0	0,00	65,75	1.318,45	410,00	-	0,00	1.728,45	54,77%
29	KAB. NIAS UTARA	590	2,40	0	0	0	0,00	2,40	321,00	0,00	-	0,00	321,00	54,41%
30	KAB. SERDANG BEDAGAI	14409	740,50	750	1755	0	0,00	3.245,50	3.818,00	3.134,00	-	0,00	6.952,00	48,25%
31	KOTA GUNUNGSITOLI	997	1,81	0	0	0	0,00	1,81	89,81	0,00	-	0,00	89,81	9,01%
32	KOTA SIBOLGA	-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
33	KOTA TANJUNG BALAI	-	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	

No	Kabupaten / Kota	Total Target LTT (Ha)	Jumlah Penyuluh	Realisasi Tgl 1-30 Mei 2026							Total LTT terhadap Target LTT Bulan Mei (%)	Target LTT Harian per Penyuluh (Ha) (31 Mei 2026)
		Mei-26		LTT Reguler (Ha)	Oplah 2024 (Ha)	Oplah 2025 (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Rehab Bencana	Total LTT (Ha)		
SUMATERA UTARA		81.726,19	2.185,00	48.951,24	6.133,90	10.182,10	59,00	1.249,20	14,00	66.589,44	81,48	6,93
1	KOTA GUNUNGSITOLI	19,66	29,00	408,54	0,00	0,00	-	0,00	0	408,54	2078,03%	-13,41
2	KAB. LABUHANBATU SELATAN	18,49	28,00	61,00	50,00	0,00	-	70,00	0	181,00	978,91%	-5,80
3	KAB. TAPANULI UTARA	39,60	154,00	202,00	0,80	0,00	-	0,00	6	208,80	527,27%	-1,10
4	KAB. NIAS UTARA	378,26	22,00	527,00	0,00	0,00	-	0,00	0	527,00	139,32%	-6,76
5	KAB. BATU BARA	1.904,50	108,00	1.588,01	68,00	717,00	-	0,00	0	2.373,01	124,60%	-4,34
6	KOTA PEMATANGSIANTAR	196,51	18,00	231,50	0,00	3,00	-	0,00	0	234,50	119,33%	-2,11
7	KOTA TANJUNG BALAI	40,46	8,00	43,00	0,00	0,00	-	1,00	0	44,00	108,75%	-0,44
8	KAB. SERDANG BEDAGAI	12.788,39	116,00	11.761,35	103,00	1.945,00	-	0,00	0	13.809,35	107,98%	-8,80
9	KAB. PADANG LAWAS	1.164,86	140,00	1.003,09	22,00	163,00	-	36,00	8	1.232,09	105,77%	-0,48
10	KAB. MANDAILING NATAL	9.289,63	135,00	6.560,72	1.258,00	993,10	-	773,35	0	9.585,17	103,18%	-2,19
11	KAB. TAPANULI SELATAN	3.117,60	162,00	2.622,65	163,00	349,00	24,00	50,75	0	3.209,40	102,94%	-0,57
12	KAB. DAIRI	846,90	88,00	868,50	0,00	1,00	-	1,50	0	871,00	102,85%	-0,27
13	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	226,27	21,00	223,00	0,00	0,00	-	0,00	0	223,00	98,55%	0,16
14	KOTA PADANGSIDIMPUAN	816,00	43,00	745,22	3,10	37,45	-	0,00	0	785,77	96,30%	0,70
15	KOTA MEDAN	174,55	25,00	134,50	0,00	16,00	7,00	8,00	0	165,50	94,82%	0,36
16	KAB. LABUHANBATU	2.351,50	59,00	1.203,28	370,50	586,50	-	10,00	0	2.170,28	92,29%	3,07
17	KAB. NIAS	1.184,28	52,00	546,00	75,00	454,00	-	0,00	0	1.075,00	90,77%	2,10
18	KAB. ASAHAN	1.456,51	88,00	679,50	239,00	369,00	-	0,00	0	1.287,50	88,40%	1,92
19	KOTA TEBING TINGGI	95,15	23,00	81,38	0,00	0,00	-	0,00	0	81,38	85,53%	0,60
20	KAB. DELI SERDANG	12.748,80	97,00	6.054,83	2.090,00	2.265,30	-	0,00	0	10.410,13	81,66%	24,11
21	KAB. PADANG LAWAS UTARA	5.201,82	68,00	2.488,75	0,00	846,25	20,00	4,50	0	3.359,50	64,58%	27,09
22	KAB. LABUHANBATU UTARA	3.488,69	55,00	617,50	1.109,00	465,00	-	0,00	0	2.191,50	62,82%	23,59
23	KOTA BINJAI	147,23	26,00	91,80	0,00	0,00	-	0,00	0	91,80	62,35%	2,13
24	KAB. TOBA	1.947,73	52,00	1.099,70	0,00	90,00	-	0,00	0	1.189,70	61,08%	14,58
25	KAB. PAKPAK BHARAT	772,57	50,00	306,45	0,00	0,00	-	145,50	0	451,95	58,50%	6,41
26	KAB. SAMOSIR	379,44	62,00	155,22	3,00	54,50	-	6,10	0	218,82	57,67%	2,59
27	KAB. SIMALUNGUN	9.938,63	164,00	5.506,65	3,50	0,00	8,00	112,50	0	5.630,65	56,65%	26,27
28	KAB. NIAS BARAT	455,45	19,00	220,00	32,00	3,00	-	0,00	0	255,00	55,99%	10,55
29	KAB. TAPANULI TENGAH	3.822,91	52,00	1.682,50	130,00	267,00	-	0,00	0	2.079,50	54,40%	33,53
30	KAB. LANGKAT	2.124,66	115,00	447,00	364,00	294,00	-	2,00	0	1.107,00	52,10%	8,85
31	KAB. KARO	2.424,02	84,00	388,50	16,00	229,00	-	16,00	0	649,50	26,79%	21,13
32	KAB. NIAS SELATAN	2.165,11	21,00	402,10	34,00	34,00	-	12,00	0	482,10	22,27%	80,14
33	KOTA SIBOLGA	-	1,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0	0,00		0,00

Kinerja LTT Bulan Juni 2026

Data Per Tanggal 30 Juni 2026

No	Kabupaten / Kota	Total Target LTT	Realisasi Tgl 30 Juni 2026							Realisasi Tgl 1-30 Juni 2026							Total LTT terhadap Target LTT Bulan Juni (%)
		Jun-26	LTT Reguler (Ha)	Oplah 2024 (ha)	Oplah 2025 (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Rehab Bencana	Total LTT (Ha)	LTT Reguler (Ha)	Oplah 2024 (Ha)	Oplah 2025 (Ha)	CSR (Ha)	Padi Gogo (Ha)	Rehab Bencana	Total LTT (Ha)	
SUMATERA UTARA		84.532,07	2.936,83	1.581,5	1.732,80	3,00	994,95	0,00	7.249,08	43.644,32	9.252,25	11.182,90	141,00	2.290,75	28,00	66.539,22	78,71%
1	KAB. LABUHANBATU SELATAN	29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	68,00	0,00	8,00	104	0,00	0	180,00	620,69%
2	KAB. TAPANULI UTARA	108	0,00	0,00	0,00	0	0,10	0	0,10	287,00	0,00	8,00	9	3,10	9	316,10	292,69%
3	KAB. SIMALUNGUN	5.003	208,60	0,00	0,00	0	1,00	0	209,60	6.213,89	0,00	0,00	0	108,50	0	6.322,39	126,37%
4	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	630	13,00	0,00	0,00	0	0,00	0	13,00	758,00	0,00	0,00	0	0,00	0	758,00	120,32%
5	KOTA GUNUNGSITOLI	221	33,30	0,00	0,00	0	0,00	0	33,30	257,36	0,00	0,00	0	0,00	0	257,36	116,45%
6	KOTA TANJUNG BALAI	46	3,00	0,00	0,00	0	0,00	0	3,00	38,00	0,00	0,00	0	10,00	0	48,00	104,35%
7	KAB. PAKPAK BHARAT	105	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	103,50	0,00	0,00	0	2,00	0	105,50	100,48%
8	KOTA TEBING TINGGI	9	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	9,00	0,00	0,00	0	0,00	0	9,00	100,00%
9	KOTA PADANGSIDIMPUAN	990	33,70	0,00	1,30	0	0,00	0	35,00	905,95	1,25	46,90	0	0,00	0	954,10	96,37%
10	KAB. TAPANULI SELATAN	2.892	103,55	20,00	10,00	0	0,75	0	134,30	2.411,61	192,00	129,00	0	42,75	0	2.775,36	95,97%
11	KAB. PADANG LAWAS UTARA	3.490	179,50	0,00	25,00	0	6,00	0	210,50	2.826,50	0,00	494,50	0	21,50	0	3.342,50	95,77%
12	KAB. ASAHAN	3.813	380,00	131,00	278,00	0	0,00	0	789,00	2.078,50	465,50	1.088,00	0	0,00	0	3.632,00	95,25%
13	KAB. PADANG LAWAS	1.685	0,75	8,00	0,00	0	0,00	0	8,75	1.534,43	11,00	32,00	17	0,00	8	1.602,43	95,10%
14	KAB. DAIRI	1.295	19,50	0,00	15,00	0	42,50	0	77,00	939,50	0,00	28,00	0	261,50	0	1.229,00	94,90%
15	KAB. DELI SERDANG	11.667	534,31	935,00	184,00	0	0,00	0	1.653,31	5.389,03	3.491,00	1.678,70	0	0,00	0	10.558,73	90,50%
16	KAB. NIAS BARAT	454	37,00	12,00	0,00	0	0,00	0	49,00	332,00	71,00	0,00	0	0,00	0	403,00	88,77%
17	KAB. NIAS SELATAN	1.124	65,00	11,00	5,00	0	0,00	0	81,00	590,53	74,00	35,00	0	157,00	0	856,53	76,20%
18	KAB. LABUHANBATU	969	2,00	0,00	2,00	0	1,00	0	5,00	431,00	78,00	185,00	0	15,50	0	709,50	73,22%
19	KAB. LABUHANBATU UTARA	2.562	1,00	14,00	0,00	0	0,00	0	15,00	274,00	1.381,50	201,00	0	0,00	0	1.856,50	72,46%
20	KOTA PEMATANGSIANTAR	390	4,00	0,00	0,00	0	0,00	0	4,00	282,50	0,00	0,00	0	0,00	0	282,50	72,44%
21	KAB. TOBA	1.165	31,00	0,00	0,00	0	1,00	0	32,00	799,00	0,00	0,00	0	19,00	0	818,00	70,21%
22	KAB. SERDANG BEDAGAI	14.947	205,00	46,00	424,50	0	0,00	0	675,50	6.055,00	542,00	3.611,00	0	0,00	0	10.208,00	68,29%
23	KAB. BATU BARA	4.477	91,05	0,00	88,00	0	0,00	0	179,05	2.186,91	0,00	847,00	0	0,00	0	3.033,91	67,77%
24	KAB. SAMOSIR	976	32,50	0,00	1,00	0	0,00	0	33,50	504,90	5,00	143,00	0	5,00	0	657,90	67,41%
25	KAB. MANDAILING NATAL	9.343	734,02	317,50	572,00	0	939,60	0	2.563,12	2.809,33	911,00	799,30	0	1.591,90	0	6.111,53	65,41%
26	KOTA MEDAN	605	6,50	0,00	0,00	0	0,00	0	6,50	363,60	0,00	11,00	8	8,00	0	390,60	64,56%
27	KAB. LANGKAT	6.765	92,00	58,00	61,00	0	0,00	0	211,00	1.431,00	1.583,00	1.315,00	0	12,00	0	4.341,00	64,17%
28	KOTA BINJAI	410	6,30	0,00	0,00	0	0,00	0	6,30	257,70	0,00	0,00	0	0,00	0	257,70	62,85%
29	KAB. NIAS	1.356	35,00	23,00	56,00	0	0,00	0	114,00	356,50	155,50	311,00	0	0,00	0	823,00	60,69%
30	KAB. TAPANULI TENGAH	4.672	76,75	6,00	10,00	0	3,00	0	95,75	2.343,00	238,50	177,50	0	17,00	0	2.776,00	59,42%
31	KAB. NIAS UTARA	1.180	7,00	0,00	0,00	0	0,00	0	7,00	696,08	0,00	0,00	0	0,00	0	696,08	58,99%
32	KAB. KARO	1.156	1,50	0,00	0,00	3	0,00	0	4,50	111,00	52,00	34,00	3	16,00	11	227,00	19,64%
33	KOTA SIBOLGA	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Pemecahan dan Upaya Pemecahannya

Indikator Kinerja	Target/ Realisasi	Permasalahan Utama	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi perbaikan/rencana tindak lanjut triwulan berikutnya
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga/0	Anggaran kegiatan bersumber dari PNBP yang masih terblokir.	- Koordinasi dengan pimpinan, Kapoksi PE, melengkapi administrasi persiapan seperti penyusunan juknis/juklak. - Usulan maksimal pencairan PNBP sudah dalam proses menunggu persetujuan dari Kanwil.	Dengan mempertimbangkan sisa waktu periode kegiatan perlu penyesuaian jadwal kegiatan lapang sehingga rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
2.1. Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	1 Teknologi/0	Permasalahan teknis (cuaca ekstrim)	Monitoring lapang	- Monitoring berkala dan koordinasi dengan instansi terkait - Melengkapi administrasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2.2. Jumlah benih/bibit sumber	4.184 Unit/0	Permasalahan teknis (cuaca ekstrim)	Monitoring Lapang, koordinasi internal melalui rapat manajemen	Penguatan monitoring dan evaluasi lapang dan

spesifik lokasi yang dihasilkan		• Terbatasnya anggaran perjalanan dinas pasca tindak lanjut pelaksanaan revisi anggaran 1 sebagai upaya penguatan dukungan prioritas direktif presiden tahun anggaran 2026.	mingguan dan mendapatkan arahan pimpinan, koordinasi eksternal baik dengan unit kerja lainnya, sekretariat BRMP, POPT, BWS, Dinas Kabupaten, serta penyuluh Kabupaten/Kota. • Penyesuaian anggaran pada beberapa akun untuk optimalisasi anggaran dengan memperhatikan estimasi kekurangan dan rasionalitas anggaran dari masing-masing akun.	koordinasi internal serta eksternal. • Melaksanakan pengusulan penyesuaian anggaran perjalanan dinas.
---------------------------------	--	---	--	--

